



Polarisasi Politik dan Upaya Rekonsiliasi melalui Halal Bihalal

Isrofia Laela Khasanah¹⁾, Fadli Zumadila Wawuan²⁾

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Jl. Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo, Yogyakarta, Indonesia

isrofia75@gmail.com¹⁾

wawuaniq@gmail.com²⁾

Abstrak

Artikel ini menyajikan ringkasan tentang polarisasi politik dan upaya rekonsiliasi melalui praktik Halal Bihalal. Masalah yang diangkat adalah polarisasi politik yang semakin meningkat dan dampak negatifnya terhadap stabilitas politik suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran praktik Halal Bihalal dalam mengatasi polarisasi politik dan membangun rekonsiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan fokus pada penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi politik disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial-ekonomi, media sosial, dan retorika politik yang keras. Praktik Halal Bihalal memiliki potensi sebagai alat efektif dalam mengatasi polarisasi politik melalui pertemuan, dialog, dan saling memaafkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Halal Bihalal dapat membangun lingkungan politik yang harmonis, inklusif, dan stabil. Dalam hal ini, integrasi praktik ini secara menyeluruh, partisipasi aktif politisi dan masyarakat, dukungan media, serta evaluasi terus-menerus menjadi faktor penting. Implementasi praktik Halal Bihalal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi polarisasi politik dan mencapai rekonsiliasi politik yang berkelanjutan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat dalam menjalankan praktik Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi politik.

Kata Kunci : Polarisasi Politik, Rekonsiliasi, Halal Bihalal

PENDAHULUAN

Dalam konteks politik modern, polarisasi politik telah menjadi fenomena yang semakin meresap ke dalam masyarakat (Alfian, 2019). Polarisasi politik mengacu pada perpecahan dan perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dibentuk oleh pilihan politik, keyakinan, dan pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu. Perpecahan ini seringkali memicu konflik sosial, menghambat proses keputusan politik yang efektif, dan mengancam stabilitas negara. Namun, dalam situasi polarisasi politik yang semakin meningkat, upaya rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk mengembalikan kebersamaan dan memperkuat jaringan sosial yang rusak. Salah satu pendekatan yang menarik adalah melalui praktik Halal Bihalal (Maulana, n.d.).

Halal Bihalal adalah sebuah tradisi atau kegiatan sosial yang sering kali dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Tradisi ini melibatkan pertemuan dan saling memaafkan antara anggota keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dalam konteks ini, Halal Bihalal memiliki potensi yang besar untuk menjadi alat rekonsiliasi dalam politik yang terpolarisasi (Sofanudin, 2022).

Artikel ini akan membahas mengenai polarisasi politik, penyebabnya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, kami akan mengulas konsep Halal Bihalal dan bagaimana praktik ini dapat diadopsi sebagai strategi rekonsiliasi dalam mengatasi polarisasi politik. Kami juga akan menyajikan beberapa studi kasus yang menggambarkan penerapan Halal Bihalal dalam konteks politik yang terpolarisasi, serta implikasi dan strategi untuk mendorong rekonsiliasi melalui praktik ini.

Polarisasi politik dapat terjadi karena berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama adalah perbedaan dalam keyakinan politik, ideologi, dan nilai-nilai yang diyakini oleh

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan pendapat dalam isu-isu seperti agama, etnisitas, ekonomi, lingkungan, atau hak asasi manusia dapat memicu polarisasi politik yang kuat. Selain itu, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dan fragmentasi media juga telah memainkan peran penting dalam memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok tersebut (Annas et al., 2019). Dampak dari polarisasi politik yang intens dapat sangat merugikan. Perpecahan ini dapat menghambat proses pembuatan keputusan yang efektif dan menghalangi kemajuan sosial dan ekonomi. Selain itu, polarisasi politik seringkali menyebabkan konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan merusak kebersamaan serta solidaritas sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang harmonis (Undang & Thamrin, 2016).

Dalam menghadapi polarisasi politik, upaya rekonsiliasi menjadi semakin penting. Rekonsiliasi adalah proses memulihkan hubungan yang rusak dan membangun kembali kepercayaan antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi (Saputra, n.d.). Salah satu cara yang menarik dan dapat efektif untuk mencapai rekonsiliasi adalah melalui praktik Halal Bihalal. Halal Bihalal menekankan pada nilai-nilai seperti memaafkan, saling memahami, dan membangun kebersamaan setelah perbedaan dan konflik. Dalam konteks politik, Halal Bihalal dapat diartikan sebagai proses memperkuat hubungan antara politisi, partai politik, dan masyarakat setelah pertentangan politik yang intens. Praktik ini melibatkan pertemuan, dialog, dan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, meredakan ketegangan, serta membangun kebersamaan dan keharmonisan di antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi (Kalundang, 2020).

Halal Bihalal memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya menjadi alat yang potensial untuk rekonsiliasi politik (Murodi, 2011). Pertama, tradisi ini menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan toleransi di atas perbedaan politik. Kedua, Halal Bihalal menekankan pada sikap saling memaafkan dan mencari titik temu yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk rekonsiliasi. Ketiga, praktik ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat jaringan sosial antara politisi, partai politik, dan masyarakat (Sofanudin, 2022).

Studi kasus dari beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dan manfaat praktik Halal Bihalal dalam mengatasi polarisasi politik. Misalnya, di Indonesia, praktik Halal Bihalal telah menjadi bagian penting dari budaya politik yang digunakan untuk meredakan ketegangan dan memperkuat persatuan di antara politisi dan partai politik. Halal Bihalal juga telah diterapkan dalam konteks politik yang terpolarisasi di negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, dan beberapa negara di Timur Tengah (Weintraub, 2011).

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan Halal Bihalal dalam konteks polarisasi politik juga memiliki tantangan. Misalnya, adanya ketidakpercayaan dan trauma antara kelompok yang terpolarisasi dapat menjadi hambatan dalam memulai proses rekonsiliasi. Selain itu, beberapa kelompok atau individu mungkin tidak menerima atau mengakui pentingnya rekonsiliasi melalui praktik ini, terutama jika mereka masih mempertahankan sikap yang keras terhadap kelompok lain (Fachrudin, 2021).

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut konsep Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi dalam mengatasi polarisasi politik. Kami juga akan menyajikan beberapa rekomendasi dan strategi untuk mendorong praktik Halal Bihalal secara lebih luas dalam konteks politik yang terpolarisasi. Terakhir, artikel ini juga akan mengulas peran politisi, pemimpin masyarakat, dan kelompok *civil society* dalam mempromosikan dan memperkuat praktik Halal Bihalal sebagai alat rekonsiliasi politik. Dengan mengeksplorasi dan memahami lebih lanjut tentang polarisasi politik, dampaknya, serta pentingnya upaya rekonsiliasi melalui praktik Halal Bihalal, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengatasi perpecahan politik dan membangun kebersamaan dalam masyarakat yang terpolarisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Metode tinjauan pustaka ini akan memberikan kerangka penelitian yang kuat untuk menyusun artikel ilmiah dengan pendekatan yang berbasis bukti dan teori. Dengan menggabungkan temuan-temuan literatur yang relevan, artikel ini akan menyajikan pemahaman yang holistik tentang topik yang dibahas, serta memberikan pemikiran dan rekomendasi yang berharga untuk pengembangan lebih lanjut dalam mengatasi polarisasi politik melalui praktik Halal Bihalal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polarisasi politik adalah fenomena di mana masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang saling bertentangan secara ideologis, politik, atau sosial (Karim, 2019). Perpecahan ini sering kali terjadi akibat perbedaan pandangan, nilai, dan tujuan yang berbeda antara kelompok-kelompok politik. Perbedaan dalam pandangan politik dapat meliputi pemahaman yang berbeda terkait pengelolaan pemerintahan, kebijakan ekonomi, hak asasi manusia, keadilan sosial, atau isu-isu lainnya yang menjadi fokus perhatian masing-masing kelompok.

Selain itu, perbedaan nilai juga menjadi faktor penting yang memicu perpecahan politik. Nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok politik dapat berkaitan dengan agama, moralitas, keadilan, kebebasan, atau prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan politik mereka (Baidawi & Novianti, 2022). Ketika ada perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai yang diyakini, perpecahan dapat terjadi karena sulitnya mencapai kesepakatan atau kompromi di antara kelompok-kelompok tersebut. Polarisasi politik menciptakan ketegangan, konflik, dan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan politik, serta merusak hubungan antarindividu dan kelompok (Maulana, n.d.).

Namun, dalam konteks polarisasi politik yang meningkat, praktik Halal Bihalal telah muncul sebagai upaya rekonsiliasi yang menarik perhatian. Halal Bihalal merupakan praktik budaya Indonesia yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk memperbaiki hubungan, meminta maaf, dan saling memaafkan. Praktik ini mengandung nilai-nilai rekonsiliasi, inklusivitas, dan memperkuat persatuan dalam masyarakat (Faidi, 2021).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa praktik Halal Bihalal memiliki potensi yang besar dalam mengurangi polarisasi politik. Pertama, praktik ini menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka antara kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi. Dalam suasana yang santai dan informal, politisi dan pemimpin masyarakat dapat bertemu, berbicara, dan mendengarkan satu sama lain dengan empati. Ini membuka kesempatan untuk memahami perspektif yang berbeda-beda, membangun pemahaman yang lebih baik, dan mencari titik temu.

Selain itu, praktik Halal Bihalal juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan yang rusak antara kelompok-kelompok politik. Dalam suasana saling memaafkan dan meminta maaf, politisi dan pemimpin masyarakat dapat menunjukkan komitmen mereka untuk melupakan masa lalu yang penuh konflik dan memulai babak baru yang lebih harmonis. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kerjasama, dan memperluas basis dukungan politik (Thahir, 2018).

Namun, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan praktik Halal Bihalal dalam rekonsiliasi politik (Mas'ud, 2021). Pertama, inklusivitas adalah kunci keberhasilan praktik ini. Semua pihak yang terpolarisasi harus dilibatkan dalam proses Halal Bihalal, sehingga tidak ada kelompok yang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Praktik ini harus mencakup politisi dari berbagai spektrum politik, partai politik, kelompok masyarakat, dan tokoh agama.

Kedua, komunikasi yang efektif menjadi landasan penting dalam praktik Halal Bihalal. Politisi dan pemimpin masyarakat harus belajar mendengarkan dengan empati, menghormati perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama. Keterampilan komunikasi yang baik membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan menghindari retorika yang memperdalam konflik. Dalam konteks ini, strategi komunikasi yang efektif, seperti penggunaan bahasa yang inklusif, penghindaran retorika yang provokatif, dan penekanan pada persamaan nilai, dapat memperkuat efektivitas praktik Halal Bihalal (Satriawan, n.d.).

Ketiga, peran media dalam praktik Halal Bihalal juga penting (Putra, 1999). Media memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi dan sikap politik masyarakat. Oleh karena itu, media harus mengedepankan tanggung jawab dalam melaporkan isu-isu politik. Mereka harus menghindari sensasionalisme, bias, dan mempromosikan narasi yang inklusif dan memperkuat rekonsiliasi politik. Kolaborasi antara praktisi media dan praktik Halal Bihalal dapat membantu membangun kesadaran dan memperkuat narasi rekonsiliasi dalam ruang publik (Abdullah, 2017).

Dalam upaya mengurangi polarisasi politik melalui praktik Halal Bihalal, penting juga untuk melibatkan lembaga pendidikan dan akademisi dalam penelitian dan pendidikan politik yang berfokus pada rekonsiliasi. Pendidikan politik yang mencakup nilai-nilai rekonsiliasi dan dialog konstruktif dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap polarisasi politik (Handoko, 2022).

Konsep Polarisasi Politik

Polarisasi politik merujuk pada perpecahan atau polarisasi yang terjadi antara kelompok-kelompok politik dalam masyarakat (Masykuri & Ramadhan, 2021). Hal ini terjadi ketika perbedaan pendapat, nilai-

nilai, atau orientasi politik yang tajam memisahkan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan. Polarisasi politik sering kali menciptakan ketegangan, konflik, dan peningkatan retorika yang memperdalam perpecahan dan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Fenomena polarisasi politik ini tidak hanya terjadi di negara-negara demokratis, tetapi juga di negara otoriter atau dengan sistem politik yang berbeda (Jali et al., 2014).

Polarisasi politik dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam pemilihan umum, kebijakan publik, maupun isu-isu sosial dan budaya. Pada tingkat pemilihan umum, polarisasi politik sering kali mencerminkan perpecahan antara partai politik dan pendukung mereka. Perbedaan pandangan dan tujuan antara partai-partai politik dapat memicu polarisasi yang intens, di mana masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan. Konflik dan rivalitas politik semakin meningkat, dengan retorika yang memperdalam pemisahan antara kelompok-kelompok.

Di sisi kebijakan publik, polarisasi politik sering kali muncul dalam isu-isu yang memicu perbedaan nilai dan keyakinan (Maulana, n.d.). Misalnya, isu-isu seperti imigrasi, hak asasi manusia, lingkungan, atau kebijakan ekonomi dapat membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berlawanan. Ketika perbedaan ini tidak dapat diatasi secara konstruktif, polarisasi politik semakin membatasi kemungkinan dialog dan kerjasama antara kelompok-kelompok tersebut. Masyarakat terjebak dalam siklus konflik dan ketegangan yang dapat menghambat kemajuan dan stabilitas sosial. Selain itu, polarisasi politik juga terkait dengan isu-isu sosial dan budaya yang mempengaruhi identitas dan afiliasi politik individu (Syarwi, 2022). Ketika isu-isu seperti agama, etnisitas, gender, atau isu sosial lainnya menjadi polarisasi, masyarakat menjadi terbagi menjadi kubu-kubu yang berseberangan. Perbedaan dalam keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari isu-isu ini memperkuat garis pemisah antara kelompok-kelompok, menciptakan ketegangan sosial yang dapat mempengaruhi hubungan antarindividu dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Undang & Thamrin, 2016).

Dalam konteks polarisasi politik yang meningkat, upaya rekonsiliasi menjadi sangat penting (Nivada, 2013). Rekonsiliasi mengacu pada usaha untuk memulihkan hubungan yang rusak, memperbaiki kepercayaan, dan mencapai kesepakatan di antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi. Salah satu praktik yang muncul sebagai upaya rekonsiliasi dalam konteks Indonesia adalah Halal Bihalal.

Halal Bihalal merupakan praktik budaya yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri di Indonesia (Khisbiyah et al., 2005). Praktik ini melibatkan pertemuan antara individu atau kelompok yang sebelumnya memiliki ketegangan atau konflik. Dalam suasana yang santai dan penuh rasa saling memaafkan, mereka bertemu, berbicara, dan membangun kembali hubungan yang terganggu. Halal Bihalal menekankan pentingnya rekonsiliasi, memaafkan, dan memulai lembaran baru yang lebih harmonis (Faidi, 2021).

Praktik Halal Bihalal memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mengatasi polarisasi politik (Achmad et al., 2019). Pertama, praktik ini menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka antara kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi. Dalam suasana yang santai dan informal, politisi dan pemimpin masyarakat dapat bertemu, berbicara, dan mendengarkan satu sama lain dengan empati. Ini membuka kesempatan untuk memahami perspektif yang berbeda-beda, membangun pemahaman yang lebih baik, dan mencari titik temu.

Selain itu, praktik Halal Bihalal juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan yang rusak antara kelompok-kelompok politik. Dalam suasana saling memaafkan dan meminta maaf, politisi dan pemimpin masyarakat dapat menunjukkan komitmen mereka untuk melupakan masa lalu yang penuh konflik dan memulai babak baru yang lebih harmonis. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kerjasama, dan memperluas basis dukungan politik (Zainal et al., 2019).

Namun, keberhasilan praktik Halal Bihalal dalam rekonsiliasi politik juga tergantung pada faktor-faktor tertentu. Pertama, inklusivitas adalah kunci keberhasilan praktik ini. Semua pihak yang terpolarisasi harus dilibatkan dalam proses Halal Bihalal, sehingga tidak ada kelompok yang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Praktik ini harus mencakup politisi dari berbagai spektrum politik, partai politik, kelompok masyarakat, dan tokoh agama. Tanpa inklusivitas yang memadai, praktik Halal Bihalal hanya akan menghasilkan rekonsiliasi yang terbatas (Adian, 2013).

Kedua, komunikasi yang efektif menjadi landasan penting dalam praktik Halal Bihalal. Politisi dan pemimpin masyarakat harus belajar mendengarkan dengan empati, menghormati perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama. Keterampilan komunikasi yang baik membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan menghindari retorika yang memperdalam konflik. Dalam konteks polarisasi politik yang meningkat, penting untuk menghindari retorika yang provokatif dan memfokuskan pada pembicaraan yang konstruktif (Undang & Thamrin, 2016).

Ketiga, peran media dalam praktik Halal Bihalal juga penting. Media memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi dan sikap politik masyarakat. Oleh karena itu, media harus mengedepankan tanggung jawab dalam melaporkan isu-isu politik (Purba & Widodo, 2020). Mereka harus menghindari sensasionalisme, bias, dan mempromosikan narasi yang inklusif dan memperkuat rekonsiliasi politik. Kolaborasi antara praktisi media dan praktik Halal Bihalal dapat membantu membangun kesadaran dan memperkuat narasi rekonsiliasi dalam ruang publik.

Dalam upaya mengurangi polarisasi politik melalui praktik Halal Bihalal, penting juga untuk melibatkan lembaga pendidikan dan akademisi dalam penelitian dan pendidikan politik yang berfokus pada rekonsiliasi. Pendidikan politik yang mencakup nilai-nilai rekonsiliasi dan dialog konstruktif dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap polarisasi politik. Selain itu, polarisasi politik juga dapat memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial, mengganggu hubungan antarindividu, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus ekstrem, polarisasi politik dapat memicu konflik sosial dan kekerasan politik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu polarisasi politik adalah perbedaan ideologi antara kelompok-kelompok politik (Agustino et al., n.d.). Ideologi yang berbeda dalam hal pandangan politik, ekonomi, dan sosial menciptakan perpecahan yang dalam dalam masyarakat. Ketika kelompok-kelompok politik mengambil sikap yang keras terhadap pandangan mereka sendiri dan menolak untuk mengakui validitas pandangan yang berbeda, polarisasi politik semakin memanas.

Selain itu, perbedaan sosial-ekonomi juga dapat menjadi faktor pendorong polarisasi politik. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi menciptakan kesenjangan yang melebar antara kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok yang merasa diperlakukan secara tidak adil dalam hal ekonomi cenderung memiliki kecenderungan untuk mendukung politik yang menjanjikan perubahan dan redistribusi kekayaan. Dalam proses ini, polarisasi politik meningkat karena kelompok-kelompok tersebut melawan status quo yang dianggap tidak menguntungkan bagi mereka (Wibowo & Zamzamy, 2015).

Pengaruh media sosial juga menjadi faktor penting dalam polarisasi politik. Media sosial telah memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka dan membentuk kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang sejalan. Namun, seringkali media sosial cenderung membentuk ekokamar informasi, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang mendukung pandangan mereka sendiri. Hal ini memperkuat polarisasi politik, karena individu tidak terpapar pada sudut pandang yang berbeda atau informasi yang melawan pandangan mereka sendiri (Yanti, 2019).

Selain itu, retorika politik yang keras juga dapat memperdalam polarisasi politik. Politisi yang menggunakan bahasa yang divisif, provokatif, atau menggambarkan kelompok lain sebagai musuh politik dapat memperkuat kesenjangan antara kelompok-kelompok politik. Retorika politik yang keras juga dapat memicu emosi negatif, memperlemah diskusi rasional, dan menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan politik (Sodikin & Utari, 2020).

Praktik Halal Bihalal sebagai Upaya Rekonsiliasi

Praktik Halal Bihalal telah menjadi tradisi sosial yang penting dalam budaya Indonesia. Tradisi ini dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri dan melibatkan pertemuan, dialog, serta saling memaafkan antara individu dan kelompok-kelompok yang terpolarisasi. Dalam konteks politik, Halal Bihalal dapat menjadi upaya yang efektif dalam membangun rekonsiliasi dan mengatasi polarisasi politik yang ada dalam masyarakat. Polarisasi politik seringkali terjadi karena adanya perbedaan dalam ideologi, latar belakang sosial-ekonomi, pengaruh media sosial, dan retorika politik yang keras. Hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara, menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif, serta melemahkan integritas institusi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonsiliasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan memulihkan kepercayaan antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi (Edi, 2021).

Dalam konteks rekonsiliasi politik, praktik Halal Bihalal dapat memiliki peran yang signifikan. Pertama, praktik ini membuka ruang untuk pertemuan dan dialog antara politisi dari berbagai spektrum politik. Dalam suasana yang saling memaafkan dan memohon maaf, politisi dapat berkumpul untuk berbicara, mendengarkan, dan memahami perbedaan pandangan serta perspektif satu sama lain. Dengan demikian, praktik ini menciptakan kesempatan bagi politisi untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mencari titik temu dalam perbedaan politik mereka. Kedua, praktik Halal Bihalal juga dapat membantu membangun keterampilan komunikasi yang efektif antara politisi yang terpolarisasi. Dalam suasana yang penuh dengan semangat saling memaafkan, politisi dapat belajar mendengarkan dengan

empati, menghormati perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama. Keterampilan komunikasi yang baik ini membantu menghindari retorika yang memperdalam konflik dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan politik yang saling menguntungkan (El-Mawa, 2021).

Selain itu, praktik Halal Bihalal juga dapat membantu mengatasi prasangka dan stereotip negatif antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi. Dalam suasana yang saling memaafkan, praktik ini menciptakan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk bertemu, berbicara, dan memahami perspektif satu sama lain (Apdal, 2021). Melalui dialog yang konstruktif dan pengalaman langsung, prasangka negatif dapat tereduksi, dan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dapat terbentuk. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan sosial yang rusak akibat polarisasi politik. Penerapan praktik Halal Bihalal dalam konteks rekonsiliasi politik juga dapat melibatkan peran media. Media memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap politik dan kelompok-kelompok politik. Dalam rangka mempromosikan rekonsiliasi, media dapat mengambil peran yang proaktif dalam meliput dan mengampanyekan praktik Halal Bihalal yang dilakukan oleh politisi. Berita dan liputan yang positif tentang pertemuan dan dialog antara politisi yang terpolarisasi dapat membantu mengubah narasi politik yang konfrontatif dan membangun citra politik yang lebih inklusif dan damai (Akmaliah, 2019).

Namun, perlu diingat bahwa praktik Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi tidak dapat berdiri sendiri. Upaya ini harus disertai dengan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem politik, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan toleransi. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dan politisi dalam praktik ini juga menjadi faktor penting dalam kesuksesannya. beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan praktik ini.

Pertama, pentingnya kesadaran dan keterlibatan politisi dalam menjalankan praktik Halal Bihalal (Az & Adnan, 2020). Politisi sebagai pemimpin dan pengambil keputusan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan politik yang harmonis dan inklusif. Dengan terlibat secara aktif dalam praktik Halal Bihalal, politisi dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan menunjukkan komitmen mereka dalam membangun rekonsiliasi politik. Hal ini juga menciptakan kepercayaan di antara politisi yang terpolarisasi dan memperkuat kerjasama di masa depan. Kedua, faktor konteks politik dan sosial juga memainkan peran penting dalam keberhasilan praktik Halal Bihalal. Adanya kerangka kerja yang mendukung, seperti adanya kebijakan yang mempromosikan rekonsiliasi politik, akan memperkuat implementasi dan dampak dari praktik ini. Selain itu, kondisi sosial yang memungkinkan dialog dan pertemuan antara kelompok yang terpolarisasi juga menjadi faktor penting. Jika ada konflik yang masih berlangsung atau ketegangan yang tinggi, praktik Halal Bihalal mungkin sulit untuk dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks politik dan sosial dalam merancang strategi praktik Halal Bihalal.

Selanjutnya, keterlibatan masyarakat secara luas juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan praktik Halal Bihalal. Masyarakat perlu menerima dan mendukung praktik ini sebagai salah satu cara untuk membangun rekonsiliasi politik. Dalam hal ini, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rekonsiliasi politik dan peran praktik Halal Bihalal dapat menjadi langkah penting. Media sosial dan media massa juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi dan mengkampanyekan nilai-nilai rekonsiliasi politik melalui praktik Halal Bihalal (Makaruku et al., 2020).

Selain itu, kerjasama antara berbagai stakeholder juga menjadi kunci dalam menjalankan praktik Halal Bihalal (Budiman & Setyahadi, 2019). Institusi politik, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan pemimpin agama dapat berkolaborasi untuk menyelenggarakan acara Halal Bihalal yang efektif. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan praktik Halal Bihalal dan menciptakan dampak yang lebih besar dalam membangun rekonsiliasi politik. Dalam mengimplementasikan praktik Halal Bihalal, penting untuk mengevaluasi dan memantau dampaknya secara berkala. Evaluasi dapat dilakukan melalui penelitian, survei, atau pemantauan langsung terhadap perubahan sikap politik, interaksi antara kelompok politik yang terpolarisasi, dan stabilitas politik secara keseluruhan. Evaluasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keefektifan praktik Halal Bihalal dan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan strategi dan implementasinya di masa depan.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan terpolarisasi, praktik Halal Bihalal dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk membangun rekonsiliasi politik. Dalam suasana saling memaafkan, dialog terbuka, dan keinginan untuk memahami perbedaan politik, praktik ini dapat menciptakan ruang untuk membangun pemahaman, memperbaiki komunikasi, dan mencari solusi bersama. Melalui implementasi yang baik, praktik Halal Bihalal dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun lingkungan politik yang lebih harmonis, inklusif, dan stabil.

Dalam melanjutkan praktik Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi politik, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan keberhasilannya (Ismail, 2012). Pertama, penting untuk mengintegrasikan praktik Halal Bihalal dalam sistem politik secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kebijakan formal yang mendorong politisi untuk secara aktif terlibat dalam praktik ini. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada politisi yang terlibat dalam pertemuan Halal Bihalal dan mempromosikan dialog politik yang konstruktif. Selain itu, praktik Halal Bihalal juga dapat dimasukkan dalam agenda politik resmi, seperti melalui pembentukan forum atau komite rekonsiliasi politik.

Kedua, perlu adanya upaya dalam membangun kapasitas politisi dalam menghadapi dan mengelola polarisasi politik. Pelatihan dan workshop yang mengajarkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan mediasi dapat membantu politisi untuk lebih efektif dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi. Selain itu, pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif dan kepentingan masing-masing kelompok politik dapat membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik dan memperkuat kesepahaman (Yanti, 2019).

Ketiga, penting untuk mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam praktik Halal Bihalal. Ini dapat dilakukan melalui melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pertemuan Halal Bihalal yang inklusif dan terbuka untuk semua pihak. Pemberian ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan berdialog secara terbuka akan mendorong partisipasi yang lebih luas dan memperkuat hubungan sosial antara kelompok-kelompok politik (Hasyim, 2020).

Keempat, media juga memiliki peran penting dalam mendukung praktik Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi politik. Media dapat memberikan liputan yang seimbang dan objektif terkait pertemuan dan dialog antara politisi yang terpolarisasi. Selain itu, media juga dapat memainkan peran sebagai fasilitator dalam menyediakan platform untuk berbagi cerita dan perspektif yang berbeda secara konstruktif. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan praktik Halal Bihalal dan mempromosikan nilai-nilai rekonsiliasi politik kepada masyarakat yang lebih luas.

Kelima, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi praktik Halal Bihalal (Mutakin, 2019). Evaluasi dapat dilakukan melalui pengumpulan data, survei, atau wawancara dengan partisipan praktik Halal Bihalal. Informasi yang diperoleh dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki strategi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengukur dampak praktik Halal Bihalal terhadap rekonsiliasi politik secara keseluruhan. Evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan akan memastikan bahwa praktik ini terus beradaptasi dan efektif dalam mengatasi polarisasi politik (Amanu & Evanne, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Praktik Halal Bihalal sebagai upaya rekonsiliasi politik memiliki potensi besar dalam membentuk lingkungan politik yang harmonis, inklusif, dan stabil. Dengan mengintegrasikan praktik ini secara menyeluruh dalam sistem politik, membangun kapasitas politisi, melibatkan masyarakat secara aktif, didukung oleh media, serta melakukan evaluasi terus-menerus, praktik Halal Bihalal dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengatasi polarisasi politik dan mencapai stabilitas politik yang lebih baik. Integrasi praktik Halal Bihalal secara menyeluruh dalam sistem politik akan memastikan bahwa nilai-nilai rekonsiliasi politik tertanam secara kuat dalam praktik politik sehari-hari. Dengan melibatkan politisi dalam praktik ini, mereka dapat menjadi pemimpin yang mempraktikkan dialog terbuka, saling memaafkan, dan memperjuangkan kesepahaman di antara kelompok-kelompok yang terpolarisasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam praktik Halal Bihalal akan menciptakan ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan berdialog secara terbuka, sehingga memperkuat hubungan sosial dan mengurangi kesenjangan politik. Dalam upaya mencapai stabilitas politik yang lebih baik, media juga memiliki peran penting dalam mendukung praktik Halal Bihalal. Media dapat memberikan liputan yang seimbang dan objektif terkait praktik Halal Bihalal, serta memainkan peran sebagai fasilitator dalam menyediakan platform untuk berbagi cerita dan perspektif yang berbeda secara konstruktif. Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi praktik Halal Bihalal juga diperlukan guna memperbaiki strategi dan mengukur dampaknya terhadap rekonsiliasi politik secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah tersebut, praktik Halal Bihalal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi polarisasi politik dan mencapai stabilitas politik yang lebih baik. Melalui integrasi, partisipasi aktif, dukungan media, dan evaluasi terus-menerus, praktik ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam mencapai rekonsiliasi politik yang berkelanjutan dan membangun lingkungan politik yang harmonis, inklusif, dan stabil.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2017). Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik. *Jurnal Sosiologi Agama*.
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1418>
- Achmad, M., Khoiruddin, M., & Ichwan, N. (2019). From Personal to Communal: The Conflict among Sunni-Shiite in Sampang, East Java. In *Sunan Kalijaga: International core.ac.uk*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/275907933.pdf>
- Adian, D. G. (2013). *Rasionalitas kerjasama: sebuah teori rekonsiliasi sosial*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=507cDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=rekonsiliasi+politik&ots=IQsIGx3f8N&sig=jWAmFe42v8yMbwOHf1EGoyPJB3s>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & ... (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal* <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>
- Agustino, L., Manan, F., & Akbar, I. (n.d.). Laporan Penelitian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama. In *eprints.untirta.ac.id*. <https://eprints.untirta.ac.id/24073/1/-Laporan-Penelitian-Polarisasi-Kesbangpol-Jabar-2022.pdf>
- Akmaliah, W. (2019). Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam dan Disinformasi Politik Elektoral. In *MAARIF*.
[download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688445&val=18113&title=Kebenaran-Yang-Terbelah-Populisme-Islam-dan-Disinformasi-Politik-Elektoral)
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688445&val=18113&title=Kebenaran-Yang-Terbelah-Populisme-Islam-dan-Disinformasi-Politik-Elektoral>
- Alfian, M. A. (2019). Polarisasi Politik. In ... /kolom/wacana/19/01/27/plztrc440-polarisasi-politik.
- Amanu, H., & Evanne, L. (2021). Peran Efek Komunikasi Politik Dalam Kekisruhan Di Partai Demokrat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*. <https://jurnal.uss.ac.id/index.php/jikoba/article/view/151>
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & ... (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian* <http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/2006>
- APDAL, A. (2021). *AGAMA DAN POLITIK (STUDI KASUS PADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA PALOPO)*. repository.iainpalopo.ac.id.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4225/1/APDAL.pdf>
- Az, A. S., & Adnan, M. (2020). Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27737>
- Baidawi, A., & Novianti, N. (2022). Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/24666>
- Budiman, S. A., & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka pada Organisasi Islam Terbesar NU dan *Jurnal Renaissance*. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/101>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. In *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung* [digilib.uinsgd.ac.id](https://digilib.uinsgd.ac.id/digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf)
<https://digilib.uinsgd.ac.id/digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- EDI, S. M. A. (2021). *TRADISI SYAWALAN SEBAGAI PENDEKATAN DAKWAH DALAM MEMPERERAT SILATURAHIM PADA MASYARAKAT KELURAHAN KORPRI JAYA KECAMATAN* repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/14821/>
- EI-Mawa, M. (2021). *Aswaja NU & Etika Berpolitik*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=O34SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=halal+bihalal+dan+rekonsiliasi+politik&ots=teAyuauZRM&sig=RiGRkILwKYkeZ9d9QtG2yHFz4KQ>
- Fachrudin, A. (2021). *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nBM3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=politik+identitas&ots=8oXVIGCYB2&sig=fRRmgZGpULX0IAaGaSITqFbAHcY>
- Faidi, A. (2021). Religious Moderation in The City Of Pancasila: Study on the Tradition of Halal Bihalal and Christmas Together as a Cultural Basis for Religious Tolerance In Salatiga *International Journal of Indonesian Society and* <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/24621>
- Handoko, H. (2022). PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/view/958>
- Hasyim, M. F. (2020). Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Fiqih



- Siyasah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3933>
- Ismail, I. (2012). ... dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons:(Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/722>
- Jali, M. F. M., Besar, J. A., Lyndon, N., & Zain, M. F. M. (2014). *Malaysia's GE-13: The'realignment'of Chinese voters*. academia.edu.
https://www.academia.edu/download/86879524/5a_paper_modhfuad.pdf
- Kalundang, A. (2020). Merajut Kebersamaan dalam Praktik Halal Bihalal di Mesjid Al-Muhajirin Kema Satu di Tengah Masyarakat Majemuk. *Mello: Jurnal Mahasiswa Kristen*. <http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/article/view/1316>
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. In *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. download.garuda.kemdikbud.go.id.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1365081&val=1307&title=Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia Catatan bagi Agenda Riset](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1365081&val=1307&title=Mengelola%20Polarisasi%20Politik%20dalam%20Sirkulasi%20Kekuasaan%20di%20Indonesia%20Catatan%20bagi%20Agenda%20Riset)
- Khisbiyah, Y., Thoyibi, M., Asy'arie, M., Aryanto, D., & ... (2005). *Ramadhan dan Lebaran: Oase Budaya Kebersamaan*. publikasiilmiah.ums.ac.id. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2164>
- Makaruku, N. D., Lattu, I. Y. M., & ... (2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Membangun Harmoni Sosial Muslim-Kristen Pra dan Pasca Konflik Etnik di Maluku. *Islamica: Jurnal Studi*
<https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/645>
- Mas'ud, A. (2021). *Paradigma Islam Rahmatan Lil Alamin*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eo06EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=halal+bihalal+dan+politik&ots=ReiKaQlhst&sig=G_ytSKS1ZJXCwAb43L-BuWC5oVc
- Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). *Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (1), 68
....
- Maulana, S. H. A. (n.d.). Polarisasi Politik Aliran di Era Reformasi. In *books.google.com*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=11NLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=perpecahan+akibat+polarisasi+politik&ots=ToEc_IWog6&sig=blf3l2eh1OlvPOOsELKVfZWLauU
- Murodi, M. A. (2011). *Rekonsiliasi Politik Umat Islam*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jl9ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=rekonsiliasi+p+olitik&ots=KkbUlxeY-n&sig=UdsAp_FoS6vlSheHNuz51FIBfD8
- Mutakin, A. (2019). Resolusi Konflik Melalui Nilai-nilai Kultur Pesantren. In *Sangkep (Jurnal Kajian Sosial Keagamaan)*. scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/ll4shbno2rckdi3jehtlkuv3d4/access/wayback/https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/download/371/505>
- Nivada, A. (2013). Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi: Transisi Politik Aceh. In *Yogyakarta: Ombak*.
- Purba, J. L. P., & Widodo, P. (2020). Kajian Etis Penggunaan Isu Agama dalam Politik Polarisasi. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*. <https://www.ojs.bmptkki.org/index.php/thronos/article/view/23>
- Putra, F. (1999). *Devolusi: politik desentralisasi sebagai media rekonsiliasi ketegangan politik negara-rakyat*. PB Pmii Kopri Bekerjasama Dengan
- Saputra, H. (n.d.). Kata kunci: Rekonsiliasi, Islam, Sukses Kepemimpinan. In *Pengantar Redaksi*. download.garuda.kemdikbud.go.id.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688443&val=18113&title=Rekonsiliasi Pascasukses Kepemimpinan Berkaca pada Penerapan Sistem Kekhalifahan Pertama dalam Islam dan Implementasinya pada Kehidupan Demokrasi Indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688443&val=18113&title=Rekonsiliasi%20Pascasukses%20Kepemimpinan%20Berkaca%20pada%20Penerapan%20Sistem%20Kekhalifahan%20Pertama%20dalam%20Islam%20dan%20Implementasinya%20pada%20Kehidupan%20Demokrasi%20Indonesia)
- Satriawan, F. (n.d.). PENGATURAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGANNYA. In *download.garuda.kemdikbud.go.id*.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495184&val=23800&title=PENGATURAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA PROBLEM DAN TANTANGANNYA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495184&val=23800&title=PENGATURAN%20POLITIK%20IDENTITAS%20DI%20INDONESIA%20PROBLEM%20DAN%20TANTANGANNYA)
- Sodikin, A., & Utari, J. J. D. (2020). MOBILISASI EMOSI MENUJU JURANG MOBOKRASI STUDI KASUS KAMPANYE# UnInstallTempo DI TWITTER. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & ...*
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/119>
- Sofanudin, A. (2022). *Tradisi Halalbihalal*. osf.io. <https://osf.io/2v58h/download>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*.
<https://ejournal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/228>



- Thahir, A. H. (2018). Polarisasi Moderatisme Islam; Tinjauan Maqashid SyariaTM ah. In *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam* download.garuda.kemdikbud.go.id.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1724138&val=8299&title=Polarisasi Moderatisme Islam Tinjauan Maqashid Syariah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1724138&val=8299&title=Polarisasi%20Moderatisme%20Islam%20Tinjauan%20Maqashid%20Syariah)
- Undang, G., & Thamrin, H. (2016). Konflik dan Integrasi Islam Politik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/4014>
- Weintraub, A. N. (2011). *Islam and popular culture in Indonesia and Malaysia*. books.google.com.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pcOsAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=e+book+halal l+bihalal&ots=JhBhhYoAhx&sig=uD8LKp3Qiv5T02PFI6H8eNd2jhE](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pcOsAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=e+book+halal+l+bihalal&ots=JhBhhYoAhx&sig=uD8LKp3Qiv5T02PFI6H8eNd2jhE)
- Wibowo, P., & Zamzamy, A. (2015). Rekonsiliasi Hubungan Sunni-Syiah di Kawasan Timur Tengah. *Journal of Integrative International* <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JIIR/article/view/195>
- Yanti, F. (2019). Komunikasi Sosial dalam Membangun Komunikasi Umat (Kajian Makna Tradisi Ied (Lebaran) pada masyarakat Muslim di Bandar Lampung). *Komunika*.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika/article/view/4752>
- Zainal, A. A., Zainal, N. A., & Syam, F. (2019). Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat Nahdatul Ulama Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara. *Vox Populi*.
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/voxpathuli/article/view/9350>